



**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN BATANG
TAHUN 2015**

Batang, Maret 2016

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 merupakan bentuk komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Batang dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang yang menggambarkan kinerja seluruh jajaran pemerintahan tentu harus kita tanggapi secara proporsional. Terhadap capaian kinerja yang baik dan bermanfaat bagi masyarakat harus kita pertahankan dan tumbuhkembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal kita lihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh alternatif pemecahannya.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang Tahun 2015 ini disusun semoga dapat bermanfaat bagi *stakeholders* dan instansi terkait lainnya serta penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Batang, 24 Maret 2016

BUPATI BATANG



YOYOK RIYO SUDIBYO

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2015

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang untuk Tahun Anggaran 2015 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Batang.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Batang, 18 Maret 2016

INSPEKTUR

KABUPATEN BATANG,
The stamp is circular with the text 'PEMERINTAH KABUPATEN BATANG' around the top edge and 'INSPEKTORAT' in the center. A signature is written over the stamp.
MOCH. ISNANTO, SE, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19590812 198003 1 010

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TELAH DIREVIU	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A Gambaran Umum Pemerintah Kabupaten Batang	1
B Lingkungan Strategis	11
C Permasalahan Utama	20
D Tujuan dan Manfaat LKJ IP	22
E Sistematika Penyajian	23
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015	24
A Perencanaan Kinerja	24
B Perjanjian Kinerja	45
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA KABUPATEN BATANG TAHUN 2015	57
A Pengukuran dan Analisa Kinerja	58
1. Tujuan reformasi birokrasi	70
2. Tujuan reformasi administrasi dan organisasi pemerintahan	74
3. Tujuan terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat	78
4. Tujuan membangun manajemen yang efektif dan efisien	80
5. Tujuan peningkatan investasi daerah dan perluasan lapangan kerja	84
6. Tujuan pengembangan perdagangan dan industri	88
7. Tujuan meningkatkan perekonomian daerah berbasis koperasi, usaha kecil, menengah dan IKM ...	94

8. Tujuan meningkatkan produksi pertanian, peternakan, kehutanan, perkebunan	98
9. Tujuan peningkatan ketahanan pangan daerah	103
10. Tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan kebudayaan dan pariwisata ..	107
11. Tujuan meningkatkan usaha perikanan darat dan laut	113
12. Tujuan meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pekerjaan umum	117
13. Tujuan pengembangan pembangunan berkelanjutan	123
14. Tujuan pengembangan pemukiman dan perumahan layak huni	129
15. Tujuan pengembangan moda transportasi	131
16. Tujuan peningkatan kualitas kependudukan dan kesejahteraan sosial	134
17. Tujuan meningkatkan kualitas kegiatan kewanitaan, kepemudaan dan keolahragaan	142
18. Tujuan meningkatkan derajat kualitas hidup masyarakat dalam bidang kesehatan	149
19. Tujuan meningkatkan kualitas harmonisasi kehidupan sosial, spiritual dan budaya masyarakat	163
20. Tujuan peningkatan pemberdayaan masyarakat serta desa	169
21. Tujuan penyelenggaraan layanan prima pendidikan yang berkualitas	172
B REALISASI ANGGARAN	183
BAB IV PENUTUP	200
A KESIMPULAN	200
B LANGKAH-LANGKAH UNTUK PENINGKATAN KINERJA	202
LAMPIRAN	

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Pemerintah Kabupaten Batang senantiasa mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat harus mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran Pemerintah Kabupaten Batang maupun masyarakat umum. Laporan kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Batang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 60 (enam puluh) SKPD. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2015 untuk mencapai 60 sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan sebab akibat dengan sasaran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan penilaian sendiri (*self assessment*) atas realisasi

pelaksanaan penetapan kinerja tahun 2015, menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja 60 sasaran adalah 99,75%, keberhasilan ini dicapai karena dari 60 sasaran strategis yang ditetapkan, 26 (dua puluh enam) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja diatas 100% ke atas (Sangat Baik/Sangat Berhasil), 29 (dua puluh sembilan) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara >75% sampai dengan 100% (Baik/Berhasil), 2 (dua) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja antara 55% sampai dengan 75% (Cukup Baik/Cukup Berhasil) dan 3 (tiga) sasaran memperoleh tingkat capaian kinerja kurang dari 55% (Kurang Baik/Kurang Berhasil). Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran adalah sebagai berikut :

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan adil			
	1) Jumlah jaringan komunikasi	12	12	100,00
	2) Web site milik pemerintah daerah	20	25	125,00
	3) Pengelolaan arsip secara baku	73	45	61,64
	4) Peningkatan SDM pengelola kearsipan	5	3	60,00
				86,66
2.	Peningkatan kepercayaan dan partisipasi masyarakat			
	1) Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	5	5	100
	2) Kegiatan pembinaan politik daerah	2	2	100
				100
3.	Transparansi informasi pembangunan			
	1) Dokumen "Kabupaten Dalam Angka"	Tersedia	Tersedia	100,00
	2) Dokumen "PDRB Kabupaten"	Tersedia	Tersedia	100,00
	3) Jumlah perpustakaan	1	1	100,00
	4) Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	200.000	198781	
	5) Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	49.375	43.821	88,75
	6) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WDP	50,00
	7) Rasio temuan BPK yang ditindaklanjuti	90%	83,71%	92,49
				90,09
4.	SOTK yang efektif dan efisien			
	1) Hasil evaluasi LAKIP Pemerintah Daerah	CC	CC	100,00
				100,00
5.	Terwujudnya masyarakat Batang yang rukun, bersatu, damai dan sejahtera			
	1) Angka kriminalitas yang tertangani	353	243	96,05

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	2) Jumlah linmas per jumlah 10.000 penduduk	7.000	6.383	91,19
	3) Rasio pos kamling per jumlah desa/kelurahan	1.250	2.099	167,92
				118,38
6.	Pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien			
	1) Pertumbuhan PDRB	7,24	5,31	73,34
	2) PDRB per kapita	4.580.000	0	0
				36,67
7.	Sinkronisasi dan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan			
	1) Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang ditetapkan dengan PERDA	Tersedia	Tersedia	100,00
	2) Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	100,00
	3) Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Tersedia	Tersedia	100,00
	4) Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100,00
				100,00
8.	Perekonomian daerah dan meningkatnya pendapatan masyarakat			
	1) Jumlah bank dan cabang	44	44	100,00
	2) Jumlah perusahaan asuransi dan cabang	3	3	100,00
	3) Jenis, kelas, dan jumlah restoran	50	80	160,00
	4) Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel	12	10	83,33
	5) Jumlah objek wisata yg dikelola pihak swasta	3	5	166,67
				122,00
9.	Kemudahan proses investasi dan usaha			
	1) Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	2	2	100,00
	2) Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	27,56	54,42	197,46
	3) Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	16,54	17,83	107,80
	4) Jumlah realisasi investasi (PMDN/PMA) (mil.)	126,54	325,87	257,52
	5) Jumlah Perijinan yang dikeluarkan	2.900	3.352	115,59
				155,67
10.	Revitalisasi pasar tradisional sehingga memiliki daya saing terhadap pasar modern			
	1) Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	16,00	16,53	103,31
				103,31
11.	Meningkatnya Industri berbahan baku lokal dan padat karya			
	1) Rasio daya serap tenaga kerja	3.000	3.010	100,33
				100,33

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
12.	Pengelolaan produksi bahan baku lokal menjadi barang jadi			
	1) Jumlah Unit usaha sentra industri (Unit)	10.573	10.617	100,42
	2) Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHB (%)	25,75	26,24	101,90
	3) Kontribusi sektor Perindustrian terhadap PDRB ADHK (%)	27,23	27	100,73
				101,02
13.	Ketersediaan dan keterjangkauan kebutuhan pokok masyarakat			
	1) Persentase Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan	90%	100%	111,11
	2) Persentase Harga realisasi dan pasokan pangan komoditas pilihan	90%	100%	111,11
				111,11
14.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas koperasi, usaha kecil dan menengah			
	1) Persentase koperasi aktif	72%	71%	99,26
	2) Usaha Mikro dan Kecil	101.310	101.240	99,93
				99,60
15.	Meningkatnya kesejahteraan pelaku koperasi dan UKM			
	1) Jumlah IKM (unit)	10.660	10.617	99,60
				99,60
16.	Terlaksananya percepatan penanggulangan kemiskinan			
	1) Masyarakat yang memperoleh ketrampilan dan kewirausahaan	1.350	1.200	88,89
				88,89
17.	Meningkatnya ketersediaan bahan pangan, produk perkebunan, dan hasil hutan			
	1) Produktivitas Padi sawah (Ton/Ha)	4,514	4.868	107,84
	2) Produksi Padi (Ton)	186.091	197.617	106,19
	3) Produktivitas Jagung (Ton/Ha)	6.144	6.027	112,74
	4) Produksi Jagung (Ton)	45.091	45.382	100,65
	5) Nilai tukar petani	100,00	100,29	100,29
	6) Cadangan Pangan Daerah (Ton)	6	7	111,17
				106,48
18.	Peningkatan kesejahteraan petani, peternak, pekebun			
	1) Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB (%)	27,00%	26,33%	97,52
	2) Jumlah Kelompok Tani Binaan	865	865	100,00
	3) Populasi Hewan ternak			
	- Sapi perah	130	135	103,85
	- Sapi potong	18.500	19.021	102,82
	- Kerbau	1.450	1.523	105,03

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	- Kambing	77.000	78.871	102,43
	- Domba	30.600	32.717	106,92
	- Ayam buras	600.000	567.902	94,65
	- Ayam ras	12.000.000	11.121.000	92,68
	- Itik	111.000	106.979	96,38
	4) Cakupan Bina Kelompok Peternak (%)	57%	57%	100,00
	5) Ketersediaan Lahan Ternak (ha)	83,52	83,52	100,00
	6) Penyakit ternak yang tertangani :			
	- Jumlah ternak yang disuntik	725	1.100	151,72
	- Persentase pengobatan (terhadap total populasi sapi)	2,97	5,74	193,27
	7) Kontribusi sub sektor perkebunan terhadap PDRB/ADHB	4,46	4,17%	93,50
				109,38
19.	Meningkatkan ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan			
	1) Ketersediaan pangan utama			
	- Padi	181.046	105.742	58,41
	- Jagung	43.769	36.254	82,83
	- Kedelai	0	0	0
	2) Ketersediaan energi dan protein per kapita			
	- Energi per kapita	2.600	3.023	116,27
	- Protein per kapita	57,00	95,00	166,67
	3) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) daerah	90%	85%	94,22
	4) Produksi hasil ternak :			
	- Daging (kg)	9.700.000	9.655.764	99,54
	- Telur (kg)	7.000.000	6.765.943	96,66
	- Susu (liter)	110.000	103.720	94,29
				89,88
20.	Meningkatnya ketahanan pangan produk perikanan			
	1) Produksi perikanan Tangkap (ton)	34.774,550	26.494,000	76,19
	2) Produksi perikanan Budidaya (ton)	2.700,60	2.583,90	95,68
				85,93
21.	Meningkatnya jumlah wisatawan			
	1) Tingkat Kunjungan wisatawan	400.000	445.991	111,50
	2) Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB ADHB	840.000.000	1.139.541.750	135,66
				123,58
22.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas objek wisata			
	1) Jumlah Obyek Wisata yang ditangani	6	5	83,33
	2) Daya dukung kelompok sadar wisata (kelompok)	10	12	120,00
				101,67
23.	Pengembangan dan pelestarian budaya lokal			
	1) Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	314	320	101,91

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				101,91
24.	Meningkatnya jumlah pelaku industri kepariwisataan			
	1) Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	1	1	100,00
	2) Jumlah grup kesenian	435	540	124,14
	3) Jumlah usaha pariwisata	105	105	100,00
				108,05
25.	Meningkatkan kesejahteraan nelayan, pembudidaya ikan, pengolah			
	1) Cakupan bina kelompok Tangkap (Kelompok)	61	554	88,52
	2) Cakupan bina kelompok Budidaya (Kelompok)	100	53	53,00
	3) Cakupan bina kelompok Pengolah dan Pemasar Perikanan (Poklahsar)	35	45	128,57
	4) Tingkat Pengelolaan Konservasi	Dikelola secara minimum	Dikelola secara minimum	100,00
				92,52
26.	Pemenuhan gizi masyarakat			
	1) Tingkat Konsumsi ikan (kg/kapita/th.)	15	25,34	168,93
				168,93
27.	Pembangunan infrastruktur pedesaan			
	1) Pembangunan infrastruktur pedesaan	17.600	8.231	46,77
	2) Panjang Jalan Desa Dalam Kondisi Baik	249	420	168,67
				107,72
28.	Pembangunan, rehabilitasi jalan dan jembatan			
	1) Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (>40 KM/Jam)	315	123	39,05
				39,05
29.	Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh			
	1) Ketaatan terhadap RTRW	100%	96%	96,00
	2) Luas wilayah produktif	88,16	80,84	91,70
	3) Luas wilayah industri	1,80	1,61	89,44
	4) Luas wilayah banjir	0,10	0,10	100,00
	5) Luas wilayah kekeringan	17,37	0	100,00
	6) Luas wilayah perkotaan	15,88	15,88	100,00
				96,19
30.	Peningkatan pembangunan dan pengelolaan irigasi, drainase, dan gorong gorong			
	1) Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	34,47	34,25	99,36
				99,36
31.	Pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup			
	1) Persentase rumah tinggal bersanitasi	50%	55%	110,00
	2) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	0,15	0,16	106,67

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3) Rasio rumah layak huni	0,15	0,20	133,33
	4) Lingkungan Pemukiman	22,05	12,00	54,42
	5) Persentase penanganan sampah	67,74%	65,52%	96,72
	6) Jumlah tempat pembuangan sampah (TPS) (unit)	124	128	103,23
	7) Jumlah daya tampung TPS (m ³)	140,63	141,03	100,28
	8) Rasio TPS per penduduk	0,16%	0,18%	112,50
	9) Cakupan tempat2 umum yg memenuhi syarat kesehatan	65,00%	66,66%	102,55
	10) Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	7,70%	9,05%	117,53
	11) Kerusakan kawasan hutan	13,20%	13,25%	99,62
	12) Menurunnya ekosistem pesisir dan laut yang rusak	1 paket	1 paket	100,00
	13) Menurunnya kawasan lingkungan yang tandus	1 paket	1 paket	100,00
				102,84
32.	Penggunaan lahan sesuai dengan daya dukung			
	1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	7,46	3,63	48,66
	2) Ketaatan terhadap RTRW	100%	96%	96,00
	3) Persentase pemohon sertifikat	100%	100%	100,00
	4) Prona (Program Nasional)	3.000	3.000	100,00
				86,16
33.	Perlindungan lahan pertanian abadi			
	1) Persentase penggunaan lahan per tahun	99,99%	99,99%	100,00
34.	Pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat			
	1) Rumah tangga pengguna air bersih	70,13%	70,00%	99,81
	2) Rumah tangga pengguna listrik	95,03%	97,04%	102,12
	3) Rumah tangga ber-Sanitasi	50,00%	55,00%	110,00
	4) Lingkungan pemukiman kumuh	0,55%	0,25%	220,00
	5) Rumah layak huni	88,00%	88,35%	100,40
				126,47
35.	Pemerataan dan keterjangkauan transportasi publik			
	1) Jumlah arus penumpang angkutan umum	10.022.000	10.019.321	99,97
	2) Rasio ijin trayek	0,66	0,65	98,48
	3) Jumlah uji kir angkutan umum	1,070	1.070	100,00
	4) 1. Pelabuhan			
	A. Pelabuhan Laut	1	1	100,00
	B. Pelabuhan Lokal	6	6	100,00
	2. Terminal			
	A. Type B	0	0	0,00
	B. Type C	1	1	100,00

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	5) Angkutan darat	3.535	3.877	109,67
	6) Kepemilikan KIR angkutan umum	535	535	100,00
	7) Lama pengujian kelayakan angkt. umum (KIR)	65 menit	65 menit	100,00
	8) Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	26.000	26.000	100,00
	9) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (Jumlah Kendaraan)	0,418	0,418	100,00
	10) Jumlah orang terangkut angkutan umum	10.022.000	10.019.321	99,97
	11) Jumlah orang melalui terminal per tahun	689.580	650.753	94,37
				93,03
36.	Terkendalinya laju pertumbuhan penduduk, meningkatkan layanan kependudukan, kesejahteraan keluarga dan perlindungan anak			
	1) Jumlah KTP yang diterbitkan per tahun	14,212	11.149	78,45
	2) Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,88	0,89	101,14
	3) Rasio bayi ber-akta Kelahiran	0,89	0,89	100,00
	4) Rasio pasangan berakta nikah	100%	100%	100,00
	5) Rasio Akta Kematian	1%	2%	174,00
	6) Kepemilikan KTP	88%	89%	101,14
	7) Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	497	504	101,41
	8) Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada	Ada	100%
	9) Rasio KDRT	0,03%	0,01%	300,00
	10) Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%	0%	100,00
	11) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	100%	100%	100,00
				123,28
37.	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui pengurangan jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera I			
	1) Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	122.552	130.298	94,06
	2) Rata-rata jumlah Jiwa per kepala keluarga	3,36	3,38	99,41
				96,73
38.	Terwujudnya keluarga kecil bahagia dan sejahtera melalui melalui peningkatan pelayanan keluarga berencana			
	1) Rata-rata jumlah anak per keluarga	2,5	1,4	178,57
	2) Rasio akseptor KB	81%	76%	94,07
	3) Cakupan peserta KB aktif	137.272	135.010	98,35
				123,67
39.	Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan lapangan kerja yang memadai			

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1) Pencari kerja yang ditempatkan	50%	67,14%	134,28
	2) Rasio informasi lowongan pekerjaan	80%	84,80%	106,00
				120,14
40.	Meningkatnya Prestasi pemuda di bidang olah raga secara kuantitatif dan kualitatif			
	1) Jumlah Organisasi Olahraga	34	34	100,00
	2) Jumlah Kegiatan Olahraga	4	4	100,00
	3) Jumlah Klub Olahraga	-	-	0,00
	4) Jumlah kejuaraan pemuda dan olah raga	2	2	100,00
				75,00
41.	Meningkatnya kuantitas dan kualitas peranan pemuda sebagai subyek dan obyek pembangunan			
	1) Jumlah Organisasi Pemuda	14	14	100,00
	2) Jumlah Kegiatan Kepemudaan	3	3	100,00
				100,00
42.	Meningkatnya pengarusutamaan gender dan peran perempuan dan setiap aspek kehidupan masyarakat			
	1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	0	0	0,00
	2) Partisipasi perempuan di lembaga swasta	37,28%	37,65%	100,99
	3) Partisipasi angkatan kerja perempuan	39,51%	38,93%	98,53
				66,51
43.	Penyediaan sarana prasarana olahraga			
	1) Jumlah Gelanggang Remaja/Balai Remaja (Selain Milik Swasta)	0	0	0,00
	2) Jumlah Lapangan Olahraga	10	10	100,00
	3) Jumlah Gedung Olahraga	0	0	0,00
				33,33
44.	Tersedianya pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu/ lansia			
	1) Cakupan masyarakat miskin yang mempunyai jaminan pelayanan kesehatan	100%	100%	100,00
	2) Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	55%	59%	108,13
	3) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan masyarakat miskin	13%	7%	57,08
	4) Cakupan pelayanan kesehatan usia lanjut	63,3%	72%	113,54
				94,69
45.	Meningkatkan gizi masyarakat dan status kesehatan			
	1) Prevalensi kekurangan gizi (gizi buruk dan gizi kurang)	11,50	7,99	143,93
	2) Angka Kematian bayi per 1.000 Kelahiran Hidup	13	13,40	97,01
	3) Angka Kematian Balita per 1.000 Kelahiran Hidup	17	16,10	105,59

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	4) Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun	2	2,24	112,00
	5) Prevalensi TB Paru BTA + per 100.000 penduduk	79	80,00	98,75
	6) Angka Insidens Demam Berdarah Dengue per 100.000 penduduk	20	45,15	44,30
	7) Prevalensi Kusta per 10.000 penduduk	1	0,54	185,19
				112,40
46.	Meningkatkan mutu pelayanan puskesmas dan rumah sakit umum daerah			
	1) Cakupan Puskesmas Terakreditasi	38%	24%	63,16
	2) Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan (RS) di Kabupaten	100%	100%	100,00
	3) Jam buka pelayanan gawat darurat	24 jam	24 jam	100,00
	4) Waktu tanggap pelayanan dokter di gawat darurat	1 menit	2,5 menit	40,00
	5) Kematian pasien kurang \leq 24 jam	0,20%	0,11%	181,82
	6) Kematian pasien $>$ 48 jam	0,24%	0,19%	129,03
				102,33
47.	Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup sehat			
	1) Cakupan rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat	85%	80,51%	94,72
				94,72
48.	Meningkatnya partisipasi masyarakat di bidang kesehatan			
	1) Cakupan Posyandu Mandiri	37%	36%	97,84
	2) Cakupan Desa Siaga Aktif	100%	100%	100,00
				98,92
49.	Meningkatkan derajat kesehatan reproduksi ibu			
	1) Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 Kelahiran Hidup	120	103,26	116,21
				116,21
50.	Terciptanya suasana masyarakat yang damai dan terbebas dari konflik SARA, baik horisontal maupun vertical			
	1) Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk	7.000	6.383	91,19
	2) Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/ kelurahan	1.250	2.099	167,92
	3) Jumlah kasus konflik SARA	0	0	100,00
				119,70
51.	Berkembangnya seni budaya lokal			
	1) Penyelenggaraan festival seni dan budaya	12	10	83,33
				83,33

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
52.	Terbinanya PGOT, pengedar/pengguna obat terlarang, prostitusi, dan pengguna minuman keras			
	1) Jumlah PMKS yang memperoleh fasilitas rehabilitasi atau pelatihan	98	86	87,76
				87,76
53.	Terciptanya pelayanan yang baik untuk fakir miskin, anak terlantar serta masyarakat kurang mampu			
	1) PMKS yg memperoleh bantuan sosial	14.529	14.052	96,72
				96,72
54.	Peningkatan peran kelembagaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan			
	1) Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	5	5	100,00
	2) Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	68	67,54	99,32
	3) Jumlah LSM	90	93	103,33
	4) LPM Berprestasi	2,4%	2,4%	100,00
	5) PKK Aktif	95%	94%	98,43
	6) Posyandu Aktif	100%	100,%	100,00
	7) Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat	3%	3%	100,00
				100,16
55.	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa / kelurahan			
	1) Jumlah desa yang administrasinya lengkap	60	60	100,00
	2) Jumlah pengesahan/evaluasi APBDes	239	239	100,00
	3) Jumlah Kades dan Perangkat desa yang mengikuti bimtek	289	289	100,00
				100,00
56.	Meningkatkan ketersediaan pendidikan dan perluasan akses pendidikan yang merata, terjangkau, setara, berkelanjutan serta berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat			
	1) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	63,30	75,38	119,08
	2) Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	106,10	105,35	99,29
	3) Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	95,15	91,66	96,33
	4) Angka Partisipasi Murni SD/MI/Paket A	95,16	96,40	101,30
	5) Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/Paket B	80,15	74,66	93,15
	6) Angka Melanjutkan SD ke SMP	100,00	92,83	92,83
	7) Angka Putus Sekolah SD/Sederajat	0,14	0,11	127,27
	8) Angka Putus Sekolah SMP/Sederajat	0,14	0,37	37,84
	9) Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/MA/Paket C	64,19	62,23	96,95

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	10) Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/MA/Pkt C	52,14	40,72	78,10
	11) Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Khusus Terlayani	52,00	52,00	100,00
	12) Prosentase sarana prasarana pendidikan khusus yang terpenuhi	84,00	84,00	100,00
				95,18
57.	Mewujudkan kualitas/mutu dan relevansi pendidikan yang memiliki keunggulan serta memberdayakan lembaga pendidikan formal dan non formal			
	1) Angka Lulusan SD/MI	100,00	99,11	99,11
	2) Angka Lulusan SMP/MTs	100,00	99,94	99,94
	3) Angka Lulusan SMA/SMK/MA	100,00	99,98	99,98
	4) Rerata Nilai UN SD/MI	7,80	6,81	87,31
	5) Rerata Nilai UN SMP/MTs	8,30	6,42	77,35
	6) Rerata Nilai UN SMA/MA/SMK	8,30	6,33	76,27
	7) Prosentase Guru memenuhi kualifikasi S1/D4			
	a. PAUD	30,00	58,36	194,53
	b. SD	86,00	85,37	99,27
	c. SMP	93,00	95,38	102,56
	d. SMA/SMK	100,00	94,91	94,91
	8) Prosentase Guru bersertifikat Pendidik			
	a. TK	20,00	33,14	165,70
	b. SD	62,00	48,34	77,97
	c. SMP	78,00	85,00	108,97
	d. SMA/SMK	78,00	71,39	91,53
	9) Angka rata-rata lama sekolah penduduk	8,00	6,80	85,00
	10) Angka Melek Huruf penduduk usia produktif	100,00	99,80	99,80
				103,76
58.	Mewujudkan dukungan sustainabilitas (keberlanjutan) lulusan anak didik sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas dengan mengembangkan dukungan nyata pembangunan fasilitas pendidikan baru yang variatif dan kreatif			
	1) Rasio ketersediaan sekolah menengah per kecamatan	4,00	3,67	91,75
	2) Angka Melanjutkan SMP ke SMA/ Sederajat	70,15	72,71	103,65
	3) Angka Putus Sekolah Pendidikan Menengah	0,34	0,33	103,03
				99,48
59.	Mewujudkan pendidikan kecakapan hidup (life skill) yang mencakup kecakapan personal, sosial, akademik dan vocational dalam meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, produk-tif, berkarakter dan berwawasan lingkungan serta memahami nilai-nilai luhur			

No	IKU	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1) Prosentase sekolah memiliki sarana prasarana pembelajaran untuk pendidikan kecakapan hidup	30	30	100,00
				100,00
60.	Mewujudkan tata kelola dan tata nilai penyelenggaraan layanan prima pendidikan			
	1) Skor LAKIP Meningkatkan	86	84,25	97,97
	2) Pemenuhan Standar Pelayanan Prima melalui SMM ISO SKPD 9001 : 2000	60	40	66,67
	3) Terpenuhinya standar pelayanan minimal dan standar pengelolaan pendidikan	80	80	100,00
				88,21
	Rata-rata capaian IKU			99,75

Berdasarkan pencapaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas dapat diketahui bahwa capaian kinerja tahun 2015 termasuk dalam kategori Baik/Berhasil, namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Adapun beberapa permasalahan dalam pencapaian kinerja antara lain sebagai berikut :

1. Belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja belum sepenuhnya berjalan dengan baik, akibatnya kurang mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, serta beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat.
3. Belum sepenuhnya terjadi sinergitas dalam pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat antara pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah kabupaten Batang,

sehingga masih terdapat beberapa sasaran yang tingkat pencapaian indikator kinerjanya kurang optimal.

4. Kurang seimbangnya anggaran yang tersedia jika dibandingkan dengan anggaran yang dibutuhkan. Alokasi anggaran yang tersedia masih lebih banyak terserap untuk komponen belanja yang ditujukan belanja aparatur dan administrasi perkantoran, sementara belanja yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi kurang proporsional.
5. Masih terjadi kesenjangan antara kebutuhan kompetensi guna pelaksanaan tugas dengan kompetensi yang dimiliki aparatur. Hal ini mengakibatkan kurangnya efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Masih rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan sering tidak berhasil secara optimal dan kurang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang, maka langkah-langkah untuk peningkatan kinerja antara lain :

1. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta mampu menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
2. Perlu adanya penyelarasan dalam perumusan sasaran, perumusan indikator kinerja dengan program dan kegiatan. Disamping itu, indikator juga diupayakan dapat menyajikan penentuan target secara tepat sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya.
3. Mengoptimalkan perencanaan pembangunan dengan mendasarkan pada skala prioritas yang selaras dengan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD)/Renstra yang telah disusun dan disepakati bersama.

4. Meningkatkan koordinasi dan hubungan kerja antar SKPD dan juga instansi-instansi di tingkat Provinsi dan pusat guna membangun sinergitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan semua urusan pemerintahan.
5. Meningkatkan kompetensi dan responsibilitas aparatur melalui pendidikan, pelatihan dan upaya-upaya lain, sehingga diharapkan segala permasalahan yang timbul, dapat segera direspon secara cepat dan akurat tanpa menimbulkan permasalahan baru.
6. Meningkatkan pendekatan kepada masyarakat dengan mensosialisasikan setiap program dan kegiatan serta dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja sehingga tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah semakin meningkat.

Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan tingkat partisipasi masyarakat akan semakin meningkat.